

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Udara	17
2.2 Pencemaran Lingkungan Hidup.....	19
2.3 Kewenangan Gubernur	23
2.4 Keputusan	26

BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
3.2 Bahan Penelitian.....	31
3.3 Cara Pengumpulan Data	34
3.4 Analisis Data	37
3.5 Lokasi Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pertimbangan Hukum dalam Putusan No.	
374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Dikaitkan dengan Bentuk-Bentuk	
Kelalaian Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam Pengendalian	
Pencemaran Udara Dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum	41
A.1 Konsep Onrechtmatige Overheidsdaad dan Timbulnya Kerugian	
Masyarakat	41
A.2 Dimensi Kelalaian Administratif Gubernur dalam Pengendalian	
Pencemaran Udara.....	45
A.3 Kualifikasi Yuridis Kelalaian sebagai Pelanggaran Konstitusi dan	
AUPB.....	49
4.2 Kebijakan Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam Pengendalian	
Pencemaran Udara sebagai Tindak lanjut dari Putusan No.	
374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst	63

B.1 Kedudukan Yuridis Putusan dan Kewajiban Gubernur Daerah	
Khusus Jakarta.....	63
B.2 Ruang Lingkup Amar Putusan terhadap Gubernur Daerah Khusus	
Jakarta	67
B.3 Tindak Lanjut Normatif dan Administratif Pemerintah Daerah	
Khusus Jakarta.....	74
B.4 Implementasi Kebijakan di Lapangan dari Gubernur Daerah	
Khusus Jakarta.....	90
B.5 Analisis Yuridis atas Bentuk dan Kualitas Kebijakan Tindak Lanjut	
.....	92
4.3 Hambatan yang Dialami oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta	
dalam Melaksanakan Implementasi Putusan No.	
374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst	96
C.1 Limitasi Yurisdiksi dan Fenomena Pencemaran Lintas Batas	
(Transboundary Pollution).....	96
C.2 Defisit Kapasitas Institusional dalam Pengawasan Industri.....	102
C.3 Hambatan Sosio-Ekonomi, Kepatuhan Kosmetik, dan Minimnya	
Transparansi.....	104
C.4 Hambatan Politik Elite dan Kebuntuan Kewenangan Sektoral	
.....	105
C.5 Stagnasi Payung Hukum dan Kedaluwarsanya Instrumen	
Regulasi	107
BAB V	109

KESIMPULAN.....	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran.....	113
Daftar Pustaka.....	115